

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

INSPEKTORAT KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

INSPEKTORAT

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Magelang 56101

Telp. (0293) 363695, Website : inspektoratmagelangkota.go.id;

Email : inspektoratmglkota@yahoo.com



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 050.23/ 315 / 112 TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang sudah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, perlu dilakukan pengesahan oleh Walikota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Magelang tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021.

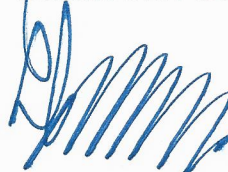
KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 untuk Perangkat Daerah se-Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Agustus 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 050.23/315/912 TAHUN 2020
 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
 TAHUN 2021

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN 2021

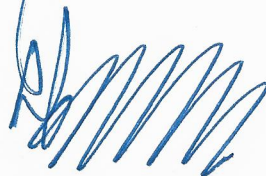
NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	170.738.771.000
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	90.927.611.000
3	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang	197.072.172.080
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	26.990.000.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	28.859.776.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	7.753.451.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	4.179.938.000
8	Dinas Sosial Kota Magelang	5.801.161.000
9	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	3.873.908.000
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	27.794.475.900
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	2.762.725.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	5.646.790.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	8.974.100.000
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	7.793.127.000
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	2.994.429.000
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	10.016.898.100
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	4.436.563.000
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	5.757.333.000
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	12.344.859.000
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.852.913.000
20	Sekretariat Dewan Kota Magelang	18.010.858.000
21	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	731.375.000
22	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum	600.606.400
23	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan	2.304.477.000
24	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	19.881.194.000
25	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	356.616.000
26	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan	465.000.000
27	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.175.826.000
28	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	236.413.000
29	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan	737.388.000
30	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	5.543.447.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
31	Kelurahan Jurangombo Selatan Kota Magelang	640.581.000
32	Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang	570.999.000
33	Kelurahan Magersari Kota Magelang	697.223.000
34	Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang	632.307.000
35	Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang	605.832.000
36	Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang	665.619.000
37	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	5.822.112.000
38	Kelurahan Cacaban Kota Magelang	720.954.000
39	Kelurahan Gelangan Kota Magelang	705.004.000
40	Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang	630.993.000
41	Kelurahan Magelang Kota Magelang	767.409.000
42	Kelurahan Panjang Kota Magelang	637.388.000
43	Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang	790.942.000
44	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	5.399.715.657
45	Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	727.500.000
46	Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang	678.064.000
47	Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang	719.249.000
48	Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang	767.466.000
49	Kelurahan Wates Kota Magelang	864.148.000
50	Inspektorat Kota Magelang	5.652.513.000
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	4.507.804.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	32.508.886.000
53	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	23.256.498.000
54	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang	2.579.904.000
	TOTAL	779.163.267.137

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021.

Rencana Kerja 2021 merupakan langkah atau upaya pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2021.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Magelang dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021, serta dapat dijadikan acuan kerja selama 1 tahun ke depan dan pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Magelang, 6 Agustus 2020

Plt.INSPEKTUR KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG



GUNADI WIRAWAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620704 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2020	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	13
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III TUJUAN, SASARAN OPD	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	21
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
4.1. Tujuan dan Sasaran	25
4.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021	26
4.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2021	27
BAB V PENUTUP	30
5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut	30

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020	6
Tabel 2.2 Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Kota Magelang	7
TABEL 2.3 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2019 dan 2020	7
TABEL 2.4 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Semester 1 Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020	8
TABEL 2.5 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Semester 1 Inspektorat Kota Magelang Tahun 2019	11
TABEL 2.6 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021	16
Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Magelang Tahun 2021	20
TABEL 4.1 Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Inspektorat Kota Magelang	25
TABEL 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam Periode RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sehingga Renja PD Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2020 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2019 sebagai bahan evaluasi kinerja. Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

- 1) Tahap Persiapan Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2020 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang.
- 2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.
- 3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian disahkan oleh Walikota melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah berpedoman kepada Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan Bappeda.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Magelang memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang;
15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan di bidang pengawasan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu pada RPJMD Kota Magelang;
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab;
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya ;
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Magelang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Kota Magelang ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab. Secara sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN OPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.2. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021

4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2021

BAB V PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Berdasarkan RKPD Kota Magelang Tahun 2020, Inspektorat Kota Magekang mendukung sasaran daerah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi”. Sesuai dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Magelang dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Inspektorat Kota Magelang.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Magelang didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana tabel berikut;

TABEL 2.1

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2019 & 2020

No	RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021							Target 2020	Ket.
	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2019	Realisasi 2020 Triwulan					
				I	II	III	IV		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Misi : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah								
	Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas								
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	-	-	WTP	-

Tabel 2.2
Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Kota Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	5	5
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100%
2.	Peningkatan pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	88%
3.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
RATA-RATA CAPAIAN						96%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Inspektorat. Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dari program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2019 & 2020

No	RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021						Realisasi 2019	Target 2020	Ket
	Program	Indikator	Realisasi 2020 Triwulan						
			I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	36,67%	66,67%	-	-	100%	75%	
		Persentase Aparat SPIP aktif	75,86%	75,86%	-	-	75,86%	75%	
		Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	0%	0%	-	-	100%	90%	
2	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	3	3	-	-	3	3	
		Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	95%	94,74%	-	-	95%	75%	
		Persentase APIP	100%	100%	-	-	100%	80%	

RENCANA KERJA 2021

No	RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021						Realisasi 2019	Target 2020	Ket
	Program	Indikator	Realisasi 2020 Triwulan						
			I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		yang bersertifikat penunjang meningkat							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	0%	0%	-	-	75,86%	70%	
		Penurunan kasus temuan LKPD	5	5	-	-	0	1	
4	Program Sinergitas Penerapan SPI	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP	70%	71,43%	-	-	76,64%	65%	
		Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIP	0,41%	0,13%	-	-	0,05%	30%	
		Persentase implementasi SPIP	75,86%	75,86%	-	-	75,86%	90%	

TABEL 2.4

Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Semester 1 Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.02.01.01	Inspektorat	3,576,335,000				
	4.02 . 4.02.01.01 . 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	1,649,500	54.98%	50.00%	50.00%
2	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52,000,000	32,987,881	63.44%	50.00%	50.00%
3	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10,524,000	1,720,000	16.34%	50.00%	15.00%
4	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65,099,000	31,443,300	48.30%	50.00%	50.00%
5	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	46,276,000	22,949,595	49.59%	50.00%	50.00%
6	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11,513,000	4,047,000	35.15%	50.00%	50.00%
7	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,550,000	3,414,400	52.13%	50.00%	50.00%
8	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,467,000	1,369,000	93.32%	50.00%	95.00%
9	4.02 . 4.02.01.01 . 1 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,400,000	1,728,000	32.00%	50.00%	35.00%

RENCANA KERJA 2021

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
10	4.02.4.02.01.01 .1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	984,000	145,000	14.74%	50.00%	20.00%
11	4.02.4.02.01.01 .1.17	Penyediaan makanan dan minuman	41,650,000	13,480,655	32.37%	50.00%	30.00%
12	4.02.4.02.01.01 .1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	133,369,000	18,610,389	13.95%	50.00%	50.00%
13	4.02.4.02.01.01 .1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	21,210,000	9,865,630	46.51%	50.00%	50.00%
	4.02.4.02.01.01 .2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
14	4.02.4.02.01.01 .2.3	Pembangunan gedung kantor	55,658,000	0	0.00%	100.00%	0.00%
15	4.02.4.02.01.01 .2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75,000,000	74,843,000	99.79%	100.00%	100.00%
16	4.02.4.02.01.01 .2.10	Pengadaan mebeleur	55,658,000	55,373,000	99.49%	100.00%	100.00%
17	4.02.4.02.01.01 .2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1,895,000	0	0.00%	8.33%	0.00%
18	4.02.4.02.01.01 .2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	210,000,000	34,983,731	16.66%	50.00%	17.00%
19	4.02.4.02.01.01 .2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,500,000	0	0.00%	0.00%	0.00%
20	4.02.4.02.01.01 .2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12,694,000	7,955,000	62.67%	100.00%	70.00%
21	4.02.4.02.01.01 .2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000	0	0.00%	0.00%	0.00%
	4.02.4.02.01.01 .6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
22	4.02.4.02.01.01 .6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10,653,000	2,925,600	27.46%	55.56%	50.00%
23	4.02.4.02.01.01 .6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3,387,000	0	0.00%	100.00%	95.00%
24	4.02.4.02.01.01 .6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,466,000	3,443,300	99.35%	100.00%	100.00%
25	4.02.4.02.01.01 .6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4,551,000	0	0.00%	50.00%	50.00%
26	4.02.4.02.01.01 .6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10,475,000	1,565,900	14.95%	64.32%	70.00%
27	4.02.4.02.01.01 .6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3,392,000	3,382,100	99.71%	100.00%	100.00%
	4.02.4.02.01.01 .15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					
28	4.02.4.02.01.01 .15.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	384,490,000	108,630,393	28.25%	50.00%	50.00%
29	4.02.4.02.01.01 .15.2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	144,795,000	40,131,000	27.72%	50.00%	50.00%
30	4.02.4.02.01.01 .15.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	215,998,000	126,632,800	58.63%	50.00%	50.00%
31	4.02.4.02.01.01 .15.8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	81,479,000	0	0.00%	0.00%	0.00%
32	4.02.4.02.01.01 .15.10	Review Laporan Keuangan	63,659,000	52,026,000	81.73%	80.00%	100.00%

RENCANA KERJA 2021

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
33	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	57,000,000	16,641,486	29.20%	50.00%	50.00%
34	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	22,059,000	7,581,000	34.37%	50.00%	50.00%
35	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 25	Penyelesaian Kerugian Negara	153,620,000	31,917,000	20.78%	50.00%	50.00%
36	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90,953,000	35,082,586	38.57%	50.00%	50.00%
37	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 34	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	46,000,000	0	0.00%	0.00%	10.00%
38	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 35	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	182,498,000	46,648,577	25.56%	50.00%	50.00%
39	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 37	Evaluasi LKjIP	45,794,000	8,950,000	19.54%	50.00%	50.00%
40	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 40	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	30,000,000	6,237,000	20.79%	54.77%	50.00%
41	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 43	Fasilitasi Kerjasama APIP - APH	177,494,000	85,180,000	47.99%	54.23%	50.00%
42	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 46	Survei Penilaian Integritas (SPI)	115,790,000	495,000	0.43%	50.00%	100.00%
43	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 47	Review Dana Alokasi Khusus	87,243,000	36,088,500	41.37%	50.00%	60.00%
44	4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 48	Pelaksanaan Pengawasan Probitiy Audit	155,432,000	56,305,000	36.22%	50.00%	85.00%
	4.02 . 4.02.01.01 . 16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					
45	4.02 . 4.02.01.01 . 16 . 3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	31,662,000	6,903,000	21.80%	57.15%	50.00%
46	4.02 . 4.02.01.01 . 16 . 6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	269,537,000	119,716,273	44.42%	50.00%	90.00%
47	4.02 . 4.02.01.01 . 16 . 8	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	58,260,000	26,584,500	45.63%	55.41%	50.00%
	4.02 . 4.02.01.01 . 17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					
48	4.02 . 4.02.01.01 . 17 . 2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	19,880,000	0	0.00%	0.00%	2.00%
49	4.02 . 4.02.01.01 . 17 . 10	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	41,009,000	35,025,000	85.41%	80.00%	85.00%
50	4.02 . 4.02.01.01 . 17 . 11	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	39,487,000	6,475,000	16.40%	52.57%	50.00%
	4.02 . 4.02.01.01 . 18	Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal					
51	4.02 . 4.02.01.01 . 18 . 1	Inventarisasi Temuan Pengawasan	51,805,000	8,150,000	15.73%	80.00%	90.00%
52	4.02 . 4.02.01.01 . 18 . 2	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	111,158,000	27,365,900	24.62%	71.63%	50.00%
53	4.02 . 4.02.01.01 . 18 . 3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	46,862,000	19,043,500	40.64%	60.40%	60.00%
	T O T A L		3,576,335,000	1,235,691,496	35.45%	54.23%	52.43%

TABEL 2.5
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Kota Magelang Tahun 2019

No.	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
			Rp.	%	Target	%
1	3	4	5	6	7	8
	Inspektorat	11,522,179,000	11,160,344,091	96.86%	100.00%	100.00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	2,934,500	97.82%	100.00%	100.00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,498,000	6,246,176	49.98%	100.00%	100.00%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10,524,000	9,507,325	90.34%	100.00%	100.00%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64,413,000	64,407,400	99.99%	100.00%	100.00%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3,296,000	3,273,750	99.32%	100.00%	100.00%
6	Penyediaan alat tulis kantor	12,143,000	12,139,100	99.97%	100.00%	100.00%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,669,000	5,646,900	99.61%	100.00%	100.00%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,600,000	3,470,000	96.39%	100.00%	100.00%
9	Penyediaan bahan logistik kantor	900,000	775,000	86.11%	100.00%	100.00%
10	Penyediaan makanan dan minuman	48,250,000	48,078,278	99.64%	100.00%	100.00%
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	162,410,000	162,152,880	99.84%	100.00%	100.00%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
12	Pembangunan gedung kantor	7,275,770,000	7,202,478,000	98.99%	100.00%	100.00%
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,356,000	4,200,000	96.42%	100.00%	100.00%
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	209,768,000	134,107,432	63.93%	100.00%	100.00%
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,600,000	1,900,000	52.78%	100.00%	100.00%
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,185,000	10,125,500	99.42%	100.00%	100.00%
17	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000	2,752,500	91.75%	100.00%	100.00%
18	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	483,514,000	480,470,000	99.37%	100.00%	100.00%
19	Pengadaan peralatan gedung kantor	192,330,000	188,965,000	98.25%	100.00%	100.00%
20	Pengadaan mebeleur	47,585,000	45,550,000	95.72%	100.00%	100.00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10,303,000	10,299,600	99.97%	100.00%	100.00%
22	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3,699,000	3,699,000	100.00%	100.00%	100.00%
23	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,582,000	3,577,200	99.87%	100.00%	100.00%
24	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4,064,000	4,059,550	99.89%	100.00%	100.00%
25	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10,608,000	10,577,000	99.71%	100.00%	100.00%
26	Penyusunan Laporan Capaian	3,169,000	3,016,500	95.19%	100.00%	100.00%

RENCANA KERJA 2021

	Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD					
27	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	10,362,000	10,076,700	97.25%	100.00%	100.00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH						
28	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	527,990,000	506,009,400	95.84%	100.00%	100.00%
29	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	128,215,000	99,991,600	77.99%	100.00%	100.00%
30	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	284,080,000	283,048,500	99.64%	100.00%	100.00%
31	Review Laporan Keuangan	65,192,000	52,325,600	80.26%	100.00%	100.00%
32	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	77,000,000	73,910,800	95.99%	100.00%	100.00%
33	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	22,000,000	21,955,000	99.80%	100.00%	100.00%
34	Penyelesaian Kerugian Negara	135,620,000	134,181,500	98.94%	100.00%	100.00%
35	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	95,234,000	43,844,100	46.04%	100.00%	100.00%
36	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	46,039,000	40,699,000	88.40%	100.00%	100.00%
37	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	167,709,000	140,331,900	83.68%	100.00%	100.00%
38	Evaluasi LKJIP	53,212,000	44,719,000	84.04%	100.00%	100.00%
39	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	23,172,000	23,000,750	99.26%	100.00%	100.00%
40	Fasilitasi Kerjasama APIP - APH	340,594,000	337,376,200	99.06%	100.00%	100.00%
41	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	319,255,000	314,773,500	98.60%	100.00%	100.00%
42	Review Dana Alokasi Khusus	59,299,000	51,708,500	87.20%	100.00%	100.00%
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan						
43	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	26,900,000	25,502,600	94.81%	100.00%	100.00%
44	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	181,219,000	176,996,500	97.67%	100.00%	100.00%
45	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	58,325,000	55,702,200	95.50%	100.00%	100.00%
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan						
46	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	17,970,000	17,820,000	99.17%	100.00%	100.00%
47	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	48,110,000	48,013,100	99.80%	100.00%	100.00%
48	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	33,985,000	31,358,000	92.27%	100.00%	100.00%
Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal						
49	Inventarisasi Temuan Pengawasan	61,900,000	61,705,850	99.69%	100.00%	100.00%
50	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	109,315,000	108,106,600	98.89%	100.00%	100.00%
51	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	37,246,000	32,778,600	88.01%	100.00%	100.00%
T O T A L		11,522,179,000	11,160,344,091	96.86%	100.00%	100.00%

Permasalahan/Kendala Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Magelang tahun 2020 antara lain :

- 1) Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal;
- 2) OPD/obrik masih kurang memahami untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- 3) Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
- 4) Belum optimalnya hasil pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS Online);
- 5) Belum terintegrasinya Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- 6) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas;
- 7) Masih kurangnya jumlah pegawai khususnya Auditor di Inspektorat Kota Magelang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kota Magelang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting Partners belum optimal;
2. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum efektif;
3. Auditor dan P2PUD bersertifikat dari instansi/ lembaga berkompeten belum memadai;
4. Kurangnya kompetensi aparatur fungsional baik dari kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP dengan adanya perubahan paradigma APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance dan Consulting Partners;

2. Kurang optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kota Magelang.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD

Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase melalui penerapan Permendagri No 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
2. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. mendukung penyelenggaraan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan, telah dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk

selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

TABEL 2.6

Review Terhadap Rancangan awal RKPd Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPd		Hasil Analisa Kebutuhan		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	%
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
INSPEKTORAT				Rp 5,652,513,000		Rp 5,652,513,000		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 5,324,283,000		Rp 5,324,283,000		
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	9 dokumen	Rp 12,000,000	9 dokumen	Rp 12,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Laporan RENJA OPD dan Laporan RENSTRA OPD	3 dokumen	Rp 2,000,000	3 dokumen	Rp 2,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	RKA OPD	1 dokumen	Rp 2,000,000	1 dokumen	Rp 2,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Rp 2,000,000	1 dokumen	Rp 2,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	DPA SKPD	1 dokumen	Rp 2,000,000	1 dokumen	Rp 2,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	Rp 2,000,000	1 dokumen	Rp 2,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Laporan capaian kinerja OPD dan LKJIP OPD	5 laporan	Rp 2,000,000	5 laporan	Rp 2,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	14 laporan	Rp 4,509,700,000	14 laporan	Rp 4,509,700,000	Rp -	0%
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Magelang	Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Rp 4,500,000,000	12 bulan	Rp 4,500,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan OPD	12 laporan	Rp 5,700,000	12 laporan	Rp 5,700,000	Rp -	0%
6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	Rp 2,000,000	1 laporan	Rp 2,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah laporan prognosis SKPD	1 laporan	Rp 2,000,000	1 laporan	Rp 2,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 laporan	Rp 4,602,000	2 laporan	Rp 4,602,000	Rp -	0%
6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan	Inspektorat	Jumlah laporan PAK	2 dokumen	Rp 4,602,000	2 dokumen	Rp 4,602,000	Rp -	0%

RENCANA KERJA 2021

	Administrasi Kepegawaian	Kota Magelang							
	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 bulan	Rp 171,207,000	12 bulan	Rp 171,207,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kota Magelang	Jumah bulan penyediaan komponen insalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 9,747,000	12 bulan	Rp 9,747,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	Rp 15,680,000	12 bulan	Rp 15,680,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp 17,724,000	12 bulan	Rp 17,724,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	Rp 9,052,000	12 bulan	Rp 9,052,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah bulan fasilitas kunjungann tamu	12 bulan	Rp 13,680,000	12 bulan	Rp 13,680,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah bulan penyelenggaraan rakor dan konsultasi	12 bulan	Rp 105,324,000	12 bulan	Rp 105,324,000	Rp -	0%
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 364,123,000		Rp 364,123,000		
	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	Rp 184,928,000	12 bulan	Rp 184,928,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	Rp 12,467,000	12 bulan	Rp 12,467,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah bulan penyediaan jasa langganan telepon, air dan listrik	12 bulan	Rp 120,000,000	12 bulan	Rp 120,000,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	Rp 52,461,000	12 bulan	Rp 52,461,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	58 unit	Rp 179,195,000		Rp 179,195,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah kendraan dinas jabatan yang dipelihara	7 unit	Rp 66,425,000	7 unit	Rp 66,425,000	Rp -	0%
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah kendraan dinas operasional yang dipelihara	15 unit	Rp 76,770,000	15 unit	Rp 76,770,000	Rp -	0%

RENCANA KERJA 2021

6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah mebeleur yang dipelihara	3 unit	Rp 3,000,000	3 unit	Rp 3,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	32 unit	Rp 22,000,000	32 unit	Rp 22,000,000	Rp -	0%
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	Rp 11,000,000	1 unit	Rp 11,000,000	Rp -	0%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Rp 186,785,000		Rp 186,785,000		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan internal	12 laporan	Rp 161,785,000	12 laporan	Rp 161,785,000	Rp -	0%
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan pengawasan kinerja pemerintah	2 laporan	Rp 50,000,000	2 laporan	Rp 50,000,000	Rp -	0%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	Rp 10,000,000	1 laporan	Rp 10,000,000	Rp -	0%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	2 laporan	Rp 7,000,000	2 laporan	Rp 7,000,000	Rp -	0%
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	3 laporan	Rp 25,000,000	3 laporan	Rp 25,000,000	Rp -	0%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4 laporan	Rp 69,785,000	4 laporan	Rp 69,785,000	Rp -	0%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	2 laporan	Rp 25,000,000	2 laporan	Rp 25,000,000	Rp -	0%
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	1 laporan	Rp 15,000,000	1 laporan	Rp 15,000,000	Rp -	0%
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 laporan	Rp 10,000,000	1 laporan	Rp 10,000,000	Rp -	0%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Rp 404,096,000		Rp 404,096,000		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 dokumen	Rp 4,000,000	1 dokumen	Rp 4,000,000	Rp -	0%
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah sisdur dan kebijakna pengawasan	1 dokumen	Rp 4,000,000	1 dokumen	Rp 4,000,000	Rp -	0%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	10 laporan	Rp 400,096,000	10 laporan	Rp 400,096,000	Rp -	0%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan	1 laporan	Rp 3,000,000	1 laporan	Rp 3,000,000	Rp -	0%

RENCANA KERJA 2021

		Pemerintahan Daerah							
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3 laporan	Rp 78,577,000	3 laporan	Rp 78,577,000	Rp -	0%	
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi PPK	5 laporan	Rp 225,769,000	5 laporan	Rp 225,769,000	Rp -	0%	
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 laporan	Rp 92,750,000	1 laporan	Rp 92,750,000	Rp -	0%	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016, Inspektorat memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja akuntabilitas kinerja dan keuangan, good governance, clean government dan pelayanan publik, serta kegiatan penunjang pengawasan lainnya. Inspektorat akan menyempurnakan usulan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat dan kondisi peraturan perundang-undangan jika mengalami perubahan dengan mengurangi ataupun menambah kegiatan yang sudah ada. Di tahun ini, Inspektorat tidak menambah kegiatan.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Magelang Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN OPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik visi Inspektorat Jenderal adalah : “Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”. Inspektorat Jenderal mempunyai komitmen untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk ;

- 1) Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi;
- 2) Melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang;
- 3) Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur;
- 4) Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan;
- 5) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka menumbuhkan anggapan yang positif/kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pengawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Magelang dirumuskan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai atau yang dihasilkan yang dianggap mampu mendukung upaya pencapaian visi misi Inspektorat dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam RENSTRA 2016-2021, Inspektorat Kabupaten Kota Magelang telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi dengan merujuk pada penjabaran Misi Pertama RPJMD Kota Magelang yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional

dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Adapun Tujuan Inspektorat Kota Magelang dalam Renstra Inspektorat Kota Magelang adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan aparatur yang berkualitas dan professional”. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat telah menetapkan 3 sasaran strategis yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan pengendalian internal;
3. Peningkatan level kapabilitas APIP.

Dalam mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator Inspektorat Kota Magelang yaitu;

1. Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Penilaian Maturitas SPIP
3. Level Kapabilitas APIP

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Magelang pada tahun 2021 adalah;

6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

	6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja
	6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan
	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	

ASISTENSI	
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	
	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Kerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016-2021. Dokumen ini juga tetap harus mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021. Berikut ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator yang ditetapkan dalam rangka mendukung visi misi Walikota Magelang;

TABEL 4.1

Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Inspektorat Kota Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP
2.	Peningkatan pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5
3.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3

4.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kota Magelang dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2021

TABEL 4.2							
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju							
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Rancangan Awal RKPD		Prakiraan Maju		Sumber	Target Capaian
		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Dana	
INSPEKTORAT			Rp 5,652,513,000		Rp 5,652,513,000		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp 5,324,283,000		Rp 5,324,283,000		
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	9 dokumen	Rp 12,000,000	9 dokumen	Rp 12,000,000	DAU	100%
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	3 dokumen	Rp 2,000,000	3 dokumen	Rp 2,000,000	DAU	100%
6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 2,000,000	1 dokumen	Rp 2,000,000	DAU	100%
6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 2,000,000	1 dokumen	Rp 2,000,000	DAU	100%
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 2,000,000	1 dokumen	Rp 2,000,000	DAU	100%
6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 2,000,000	1 dokumen	Rp 2,000,000	DAU	100%
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Kota Magelang	5 laporan	Rp 2,000,000	5 laporan	Rp 2,000,000	DAU	100%
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	14 laporan	Rp 4,509,700,000	14 laporan	Rp 4,509,700,000	DAU	100%
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 4,500,000,000	12 bulan	Rp 4,500,000,000	DAU	100%
6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Inspektorat Kota Magelang	12 laporan	Rp 5,700,000	12 laporan	Rp 5,700,000	DAU	100%
6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp 2,000,000	1 laporan	Rp 2,000,000	DAU	100%
6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp 2,000,000	1 laporan	Rp 2,000,000	DAU	100%
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	2 laporan	Rp 4,602,000	2 laporan	Rp 4,602,000	DAU	100%
6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Kota Magelang	2 dokumen	Rp 4,602,000	2 dokumen	Rp 4,602,000	DAU	100%

RENCANA KERJA 2021

6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 171,207,000	12 bulan	Rp 171,207,000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 9,747,000	12 bulan	Rp 9,747,000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 15,680,000	12 bulan	Rp 15,680,000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 17,724,000	12 bulan	Rp 17,724,000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 9,052,000	12 bulan	Rp 9,052,000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 13,680,000	12 bulan	Rp 13,680,000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 105,324,000	12 bulan	Rp 105,324,000	DAU	100%
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 364,123,000		Rp 364,123,000		
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 184,928,000	12 bulan	Rp 184,928,000	DAU	100%
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 12,467,000	12 bulan	Rp 12,467,000	DAU	100%
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 120,000,000	12 bulan	Rp 120,000,000	DAU	100%
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kota Magelang	12 bulan	Rp 52,461,000	12 bulan	Rp 52,461,000	DAU	100%
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat Kota Magelang	58 unit	Rp 179,195,000		Rp 179,195,000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Magelang	7 unit	Rp 66,425,000	7 unit	Rp 66,425,000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kota Magelang	15 unit	Rp 76,770,000	15 unit	Rp 76,770,000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Kota Magelang	3 unit	Rp 3,000,000	3 unit	Rp 3,000,000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	32 unit	Rp 22,000,000	32 unit	Rp 22,000,000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	1 unit	Rp 11,000,000	1 unit	Rp 11,000,000	DAU	100%
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Rp 186,785,000		Rp 186,785,000		
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Inspektorat Kota Magelang	12 laporan	Rp 161,785,000	12 laporan	Rp 161,785,000	DAU	100%

RENCANA KERJA 2021

	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	2 laporan	Rp 50,000,000	2 laporan	Rp 50,000,000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp 10,000,000	1 laporan	Rp 10,000,000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Magelang	2 laporan	Rp 7,000,000	2 laporan	Rp 7,000,000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Magelang	3 laporan	Rp 25,000,000	3 laporan	Rp 25,000,000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Magelang	4 laporan	Rp 69,785,000	4 laporan	Rp 69,785,000	DAU	100%
	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Magelang	2 laporan	Rp 25,000,000	2 laporan	Rp 25,000,000	DAU	100%
	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp 15,000,000	1 laporan	Rp 15,000,000	DAU	100%
	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp 10,000,000	1 laporan	Rp 10,000,000	DAU	100%
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Rp 404,096,000		Rp 404,096,000		
	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 4,000,000	1 dokumen	Rp 4,000,000	DAU	100%
	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 4,000,000	1 dokumen	Rp 4,000,000	DAU	100%
	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kota Magelang	10 laporan	Rp 400,096,000	10 laporan	Rp 400,096,000	DAU	100%
	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp 3,000,000	1 laporan	Rp 3,000,000	DAU	100%
	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Magelang	3 laporan	Rp 78,577,000	3 laporan	Rp 78,577,000	DAU	100%
	6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Magelang	5 laporan	Rp 225,769,000	5 laporan	Rp 225,769,000	DAU	100%
	6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp 92,750,000	1 laporan	Rp 92,750,000	DAU	100%

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan sumber daya pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Inspektorat merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat. Kaidah Pelaksanaan Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan resiko OPD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing OPD yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih sehingga dapat mendukung terwujudnya *good governance* pada Pemerintahan Kota Magelang.

Rencana Tindak Lanjut pada Inspektorat Kota Magelang adalah:

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan;
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat Daerah Kota Magelang;
3. Membuka layanan klinik konsultasi/ layanan pengaduan;
4. Melakukan Survei Penilaian Integritas.
5. Meningkatkan Kapasitas SDM melalui diklat, PKS (pelatihan Kantor Sendiri), maupun webinar;
6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kelancaran pengawasan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Plt.INSPEKTUR KOTA MAGELANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG



GUNADI WIRAWAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620704 199103 1 006